



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS TIDAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAPTO NISWORO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 648269

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 830.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/120 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 529.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 301.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 84.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC WONDER Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU HIJET 1000/S7OP/R Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA/C100 Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 428.108.526**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.342.108.526**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.342.108.526

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.